

PRODUK INDUSTRI MANUFAKTUR DOMINASI EKSPOR NON-MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL

Juli Panglima Saragih

Abstrak

Sektor industri manufaktur masih mendominasi ekspor nasional di luar minyak dan gas bumi (non-migas) nasional dan menjadi penopang utama dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, industri manufaktur harus terus dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Di sisi lain, pertumbuhan impor barang untuk kebutuhan industri manufaktur dalam negeri tidak bisa dihindari. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja ekspor-impor non-migas. Pemerintah perlu terus menggenjot ekspor non-migas di masa mendatang, baik melalui skema perjanjian kerja sama perdagangan bilateral (bilateral free trade agreement) dalam konteks kerja sama regional seperti CEPA. Upaya lain adalah mencari pasar-pasar baru tujuan ekspor non-migas seperti Afrika, Amerika Tengah, dan Eropa Timur agar target pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 11% tahun 2018 dapat diraih.

Pendahuluan

Sektor industri manufaktur sampai saat ini masih menjadi sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Industri manufaktur tidak hanya penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di dalam negeri, tetapi produk industri manufaktur terutama non-migas juga dapat diekspor ke pasar internasional untuk mendapatkan devisa bagi masyarakat dan negara. Untuk mengembangkan sektor industri manufaktur maka

dibutuhkan dukungan sektor lain seperti; investasi, pertanian, transportasi, energi, SDM, serta sektor lain yang terkait langsung dengan industri.

Dalam konteks perekonomian global saat ini dan ke depan, peran ekspor non-migas sangat penting terutama dalam kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto). Tetapi Indonesia juga masih membutuhkan impor bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri untuk proses



industri manufaktur yang produk akhirnya dapat diekspor kembali. Jika nilai ekspor non-migas (minus impor) meningkat, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebab ekspor non-migas berkontribusi besar terhadap kinerja ekspor nasional.

Kinerja dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Non-Migas

Selama 4 (empat) tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, nilai ekspor non-migas khususnya industri manufaktur terus meningkat sejak 2014. Pada tahun 2014, nilai ekspor produk industri manufaktur non-migas mencapai USD119,75 miliar, naik menjadi USD125,02 miliar tahun 2017 lalu. Periode Januari-Juni 2018 nilai ekspor industri manufaktur mencapai 71,59% terhadap total ekspor non-migas nasional sebesar USD88,02 miliar. Pada Juli 2018 lalu, nilai ekspor non-migas mencapai USD14,81 miliar yang merupakan tertinggi sejak Januari 2018. Sedangkan secara kumulatif nilai ekspor non-migas periode Januari-Juli 2018 sebesar USD94,21 miliar (*Suara Pembaruan*, 29 Oktober 2018).

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kinerja ekspor bulan Juli 2018 tersebut menunjukkan sinyal positif dalam upaya pencapaian target ekspor yang telah ditetapkan pemerintah. Pencapaian kinerja ekspor non-migas tersebut memperkuat optimisme pencapaian target pertumbuhan ekspor non-migas 11% tahun 2018 ini atau USD170 miliar. (*www.wartaekonomi.co.id*, 29 Oktober 2018).

Pemerintah saat ini fokus meningkatkan nilai ekspor non-migas untuk mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri.

Peningkatan ekspor non-migas juga penting untuk penguatan nilai rupiah. Hal ini sesuai target dari peta “*Making Indonesia 4.0*” di mana tahun 2030 ditargetkan angka ekspor netto hingga 10%. Oleh karena itu 5 (lima) sektor industri manufaktur yang diprioritaskan dikembangkan saat ini dan ke depan dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0, juga didorong untuk aktif melakukan ekspor non-migas ke pasar dunia. Adapun ke-5 sektor industri manufaktur tersebut adalah: 1) industri makanan dan minuman; 2) industri tekstil dan pakaian (industri TPT); 3) industri otomotif; 4) industri kimia; dan 5) industri elektronika. Kelima industri di atas mampu berkontribusi sebesar 65% terhadap total ekspor non-migas, berkontribusi 60% pada PDB dan mampu menyerap 60% tenaga kerja Indonesia (TKI), (*Suara Pembaruan*, 29 Oktober 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa defisit neraca perdagangan luar negeri Januari-September 2018 berjumlah USD3,78 miliar. Defisit ini akan berkontribusi terhadap defisit transaksi berjalan (*current account*). Momentum kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini perlu dimanfaatkan karena akan mendorong harga sejumlah komoditas ekspor non-migas Indonesia seperti minyak sawit mentah (CPO), produk turunan dari CPO, batu bara, dan karet. Oktober-Desember 2018 dan 2019 merupakan ujian berat bagi kinerja perdagangan luar negeri Indonesia (*Kompas*, 23 Oktober 2018).

Akses ekspor CPO ke pasar non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan diperlukan agar Indonesia tidak bergantung kepada mitra tradisional seperti AS, Tiongkok, dan India. Di samping

itu pengembangan industri hilir sawit serta implementasi *mandatory Biodiesel B-20* terus dipercepat (*Bisnis Indonesia*, 30 Oktober 2018).

Dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) Oktober 2018 lalu, menurut data Kementerian Perdagangan transaksi jual-beli selama pameran berlangsung mencapai 8,45 miliar dari target USD1,5 miliar dengan total 78 importir dari 30 negara. Kerja sama perdagangan luar negeri ini disepakai dan dicapai dengan penandatanganan "*Memorandum of Understanding*" (MoU), khususnya untuk tiga sektor ekonomi yakni; 1) investasi, 2) perdagangan, dan 3) pariwisata. (*Republika*, 29 Oktober 2018).

Dalam TEI tersebut pemerintah Indonesia juga memperkuat kerja sama perdagangan langsung antar-negara (kerjasama bilateral). Indonesia dan Rusia misalnya, telah sepakat meningkatkan nilai perdagangan dan investasi melalui forum Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-12 bidang ekonomi, perdagangan, teknik, energi termasuk nuklir untuk tujuan damai, transportasi dan infrastruktur, serta telekomunikasi dan keuangan (perbankan) (*Republika*, 29 Oktober 2018).

Sementara itu Kementerian Perdagangan mengajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian membahas rencana pembebasan tarif bea masuk ekspor perhiasan Indonesia ke negara tujuan. Artinya dengan pengurangan/penghapusan tarif bea masuk ekspor perhiasan tersebut, pengusaha perhiasan tertarik untuk meningkatkan ekspor di masa mendatang. Menurut Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, pembebasan tarif

bea masuk dapat dilakukan apabila kedua negara memiliki perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA). Sampai saat ini negara Turki dan Uni Emirat Arab (UEA) merupakan dua negara yang sudah lama membeli berbagai produk perhiasan dari Indonesia. Kementerian Perindustrian mencatat selama 2017 lalu nilai ekspor perhiasan mencapai USD2,7 miliar. Data sampai September 2018 nilai ekspor perhiasan ke pasar dunia sebesar USD1,4 miliar. Kementerian Perindustrian meminta produsen perhiasan (Asosiasi Perhiasan Emas dan Permata) untuk memperkuat "*brand*" produk perhiasan asli Indonesia. Pemerintahpun sudah memiliki program dan kegiatan seperti program pelatihan dan pendampingan tenaga ahli desainer, bantuan mesin, dan peralatan lainnya di Unit Pelayanan Teknis. Kementerian Perindustrian juga sudah menyelenggarakan pameran perhiasan skala internasional di Surabaya, pada 27 Oktober 2018, (*Republika*, 29 Oktober 2018).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan negosiasi perjanjian dagang antara blok empat negara Eropa Tengah dan Eropa Utara dengan Indonesia optimis berhasil. Indonesia ikut serta dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) dengan Norwegia, Islandia, Liechtenstein, dan Swiss. Keempat negara tersebut merupakan anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA). Pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri juga melakukan kerja sama bilateral dengan beberapa negara seperti; Tiongkok, Panama, Mesir, Australia, Malaysia, Arab Saudi, Maroko, dan Afrika Selatan. Indonesia juga memperkenalkan Pameran Pangan Nusa 2018 dengan transaksi mencapai USD680 ribu.

Indonesia merupakan salah satu negara industri kayu ringan di dunia baik untuk furnitur, bahan bangunan tinggi, dan transportasi, dan merupakan satu-satunya negara dengan verifikasi legalitas kayu terbaik yang diterima *European Union Forest Law Enforcement, Governance, and Trade*. (Kompas, 29 Oktober 2018).

Analisis: Tantangan Ekspor Non-Migas

Tiongkok, Vietnam, dan Thailand merupakan pesaing ekspor non-migas Indonesia di Asia ke pasar dunia saat ini. Tiongkok dan Vietnam misalnya telah mampu meningkatkan ekspor alas kaki ke pasar dunia mengalahkan Indonesia. Nilai ekspor alas kaki dari Indonesia ke luar negeri 2017 lalu hanya mencapai USD4,9 miliar. Sebagai produsen pupuk terbesar di ASEAN, Indonesia juga mampu meningkatkan ekspor pupuk ke pasar dunia sebesar USD332 juta sampai September 2018. Target ekspor pupuk dari Indonesia 2018 ke pasar internasional USD650,56 juta dengan volume 1,58 juta ton (*Bisnis Indonesia*, 29 Oktober 2018).

Ekspor otomotif (khususnya *low cost green car*) juga terus berkembang terutama sejak 2014. Indonesia kini sudah mengeksport mobil LCGC seperti Toyota Wigo dan Suzuki Wagon ke beberapa negara seperti Pakistan, India, dan Vietnam. Sedangkan produsen otomotif lainnya seperti Honda merencanakan akan meningkatkan ekspor tahun 2019 mendatang (*Bisnis Indonesia*, 29 Oktober 2018). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GIKBI), ekspor mobil dari Indonesia ke Philippina Januari-September 2018 meningkat 20% dengan kontribusi sebesar 33,55% terhadap total ekspor mobil

nasional (*Bisnis Indonesia*, 30 Oktober 2018).

Tantangan kinerja ekspor non-migas pada 2019 bakal makin berat, karena dampak negatif dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China akan benar-benar dirasakan pada tahun depan. Penulis memperkirakan dampak perang dagang AS-China akan mulai terasa pada 2019 baik dari sisi ekspor maupun impor non-migas. Dampak dari AS mungkin tidak terasa besar, karena ekspor non-migas kita lebih banyak produk jadi dan impornya juga masih bisa dikontrol. Tetapi dengan China ini harus diwaspadai. Hal tersebut terjadi karena produk ekspor non-migas Indonesia mayoritas masih berupa barang mentah ke Tiongkok. Adanya pembatasan impor dari China dan AS akan berpotensi membuat konsumsi barang mentah China dari Indonesia melambat secara gradual. Indonesia harus bersaing lebih ketat dengan Vietnam yang juga sedang mengincar peluang dari perang dagang tersebut. Terlebih bahwa industri manufaktur Vietnam dan Thailand di ASEAN jauh lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia saat ini.

Produk buah-buahan, barang dari besi dan baja serta aluminium misalnya dapat mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan AS di China. Sebaliknya, RI juga dapat mendongkrak ekspor besi dan baja serta aluminium ke AS. Indonesia sudah memiliki perjanjian dagang bebas *China-ASEAN Free Trade Agreement* (CAFTA) dengan China. Lalu dengan AS, Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas *General System of Preference* (GSP) dan pengecualian bea masuk beberapa produk besi dan baja. Jadi kini tinggal kesiapan dari sektor industri manufaktur dalam negeri memanfaatkannya.

Dari sisi ekspor jasa, terdapat tiga potensi besar untuk mendorong ekspor jasa yakni dari sektor jasa transportasi, asuransi, dan pariwisata. Adapun ekspor jasa sampai akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai USD29.132 juta. Hal itu berdasarkan pada pola setiap tahunnya di mana ekspor jasa di semester kedua selalu lebih tinggi dibandingkan dengan paruh pertama tahun berjalan. Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu berpendapat selama ini sektor jasa yang mengalami defisit yakni sektor transportasi di mana pada Semester I-2018, defisit mencapai sebesar USD3.631 juta. Hal ini dikarenakan sektor perdagangan di Indonesia yang meningkat, sehingga berdampak pula adanya permintaan jasa transportasi di Indonesia. (<http://industri.bisnis.com>, 29 Oktober 2018).

Penutup

Peningkatan kinerja ekspor non-migas setiap tahun sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Meningkatnya ekspor non-migas jika tidak dibarengi dengan turunnya impor minyak dan gas bumi serta non-migas, maka tidak akan memberikan nilai signifikan kepada kinerja ekspor secara keseluruhan dan perekonomian (PDB).

Pemerintah dan pelaku usaha harus terus-menerus meningkatkan ekspor non-migas ke seluruh dunia, tidak hanya ke pasar negara tujuan utama tetapi membuka pasar ekspor baru, seperti ke negara-negara Afrika, Amerika Tengah, dan Eropa Timur. Jika kinerja perdagangan luar negeri non-migas membaik sampai akhir 2018 ini dan tahun 2019 mendatang, maka akan sangat membantu penguatan nilai rupiah terhadap dolar AS. Sebaliknya jika

pertumbuhan ekspor non-migas lebih rendah dari impor non-migas, maka akan berdampak pada meningkatnya depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Kinerja ekspor non-migas sampai akhir 2018 ini masih cukup berat dalam upaya mencapai pertumbuhan ekspor sebesar 11%. Dengan segala upaya dan kerja keras, pemerintah harus optimis dan meningkatkan kerja sama dengan pelaku-pelaku usaha agar dapat mencapai target ekspor non-migas tahun 2018 dan 2019 mendatang dengan meningkatkan daya saing dan kualitas produk industri manufaktur dalam negeri.

DPR sebagai lembaga legislatif perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan dan regulasi ekspor non-migas agar target ekspor non-migas 2018 dan 2019 dapat diraih. Selain itu, ekspor produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga masih dapat ditingkatkan terutama ke pasar non-tradisional, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan.

Referensi

- "Akses CPO ke Pasar Baru Mendesak", *Bisnis Indonesia*, 30 Oktober 2018, hal. 22.
- "Daya Saing Meningkat Sambut Revolusi Industri Ke-7", *Kompas*, 29 Oktober 2018, hal. 9.
- "Ekspor Alas Kaki Menapaki Jalan Terjal", *Bisnis Indonesia*, 29 Oktober 2018, hal. 21.
- "Ekspor Nonmigas Juli 2018 Catatkan Rekor Tertinggi", <https://www.wartaekonomi.co.id/read192352/ekspor-nonmigas-juli-2018-catatkan-rekor-tertinggi.html>, diakses 29 Oktober 2018.
- "Industri Manufaktur Dominasi Ekspor Nasional Hingga 72%", *Suara Pembaruan*, 26 Oktober 2018, hal. 9.
- "Indonesia Masih Diminati", *Republika*, 29 Oktober 2018, hal. 13.

- “Perundingan RI-EFTA Ditarget Tuntas Tahn Ini”, *Kompas*, 29 Oktober 2018, hal. 8.
- “Pameran dagang Topang Ekspor Non-Migas Indonesia”, *Kompas*, 29 Oktober 2018, hal. 17.
- “PI Genjot Ekspor”, *Bisnis Indonesia*, 29 Oktober 2018, hal. 21.
- “Pengapalan Mobil CBU ke Philippina Meningkatkan”, *Bisnis Indonesia*, 30 Oktober 2018, hal. 28.
- “2019, Tantangan Ekspor Barang dan Jasa Makin Berat”, <http://industri.bisnis.com>, diakses 29 Oktober 2018.



Juli Panglima Saragih
juli.saragih@dpr.go.id

Drs. Juli Panglima Saragih, MM., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu Hubungan Internasional di Fakultas FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung pada tahun 1988 dan pendidikan S2 Magister Manajemen (MM) Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (2015)”, “Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Menjaga Ketahanan Pangan, Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah” (2015), dan “Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian di Masa Datang” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.